

PENERAPAN PENCATATAN AKUNTANSI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN SAK ETAP PADA UMKM DESA GEMBONGSARI KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI

Deddy Kurniawanysah
Universitas Airlangga Surabaya
Email: Dedyshop@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap persepsi UMKM mengenai proses akuntansi dan laporan keuangan; mendeskripsikan penerapan SAK ETAP pada UMKM; mengungkap kendala dalam penerapan SAK ETAP pada UMKM; menyusun dan mengembangkan panduan proses akuntansi berdasarkan SAK ETAP untuk UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Populasi penelitian ini adalah UMKM di Desa Gembongsari. Sampel Penelitian ini sebanyak 30 UMKM. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, kuesioner dan Forum Grup Discussion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM belum membutuhkan informasi akuntansi dan menyatakan bahwa sulit untuk melakukan pencatatan akuntansi dengan segala keterbatasan yang dimiliki. Kebutuhan dalam penyelenggaraan catatan akuntansi dianggap hanya membuang waktu dan biaya. Responden mengakui pentingnya pencatatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dalam mendukung keberlanjutan perusahaan, tetapi belum menerapkan sesuai SAK ETAP karena berbagai kendala. UMKM di Desa Gembongsari belum menerapkan pencatatan akuntansi sesuai standar baku dan belum menggunakan informasi akuntansi secara optimal.

Kata-kata Kunci: Pencatatan Akuntansi, Penyusunan Laporan Keuangan, SAK ETAP, UMKM.

Abstract

This study aimed to: reveal the perception of SMEs about accounting and financial reporting process; describes the application of SAK ETAP on SMEs; reveal obstacles in the implementation of SAK ETAP on SMEs; prepare and develop guidelines based SAK ETAP accounting process for SMEs. This study used a qualitative approach. The population was MSMEs in the village Gembongsari. This study sample of 30 SMEs. Data collection techniques used were interviews, questionnaires and Forum Group Discussion. The results of indicate that SMEs do not require accounting information and stated that it is difficult to perform the accounting records with any limitations. Moreover, the need in the organization of accounting records is considered a waste of time and cost. Respondents recognized the importance of accounting records and preparation of financial statements in support of the sustainability of the company, but have not applied in accordance with SAK ETAP due to various constraints. SMEs in the village Gembongsari yet to implement appropriate accounting standards and has not been used optimally accounting information.

Key Words: Accounting Record, Financial Statements, FAS ETAP, SMEs.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terbukti memiliki peran dan memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pada tahun 2016 Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2016 mencapai 60 persen menuju 70 persen. Dari jumlah tersebut 30,3 persen disumbang oleh usaha mikro, (www.depkop.go.id). Pada tahun 2015 jumlah unit UMKM di Indonesia mencapai 72.2 juta unit usaha yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Pada dasarnya UMKM memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan kredit untuk tambahan modal. Hingga saat ini banyak program pembiayaan bagi UMKM baik yang dijalankan oleh pemerintah maupun oleh perbankan. Salah satu program pemerintah Indonesia terkait pembiayaan UMKM adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tujuan dari KUR tersebut adalah untuk menjadi solusi pembiayaan modal yang efektif bagi UMKM, sebab selama ini banyak UMKM yang terkendala untuk akses terhadap perbankan untuk mendapatkan bantuan pembiayaan (Basri dan Nugroho, 2009). Namun pada prakteknya realisasi KUR jauh dari target karena bank yang ditunjuk sebagai penyalur KUR masih telalu berhati-hati dalam penyaluran kredit terkait tidak adanya akses informasi yang memadai terkait kondisi UMKM. Mayoritas pengusaha UMKM tidak mampu memberikan informasi akuntansi terkait kondisi usahanya sehingga membuat informasi tersebut menjadi lebih mahal bagi perbankan (Baas dan Schrooten, 2006).

Suhairi (2004) berpendapat bahwa kelemahan UMKM dalam penyusunan laporan keuangan disebabkan rendahnya pendidikan, kurangnya pemahaman terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan pelatihan penyusunan laporan keuangan. Satyo (2005) berpendapat bahwa rendahnya penyusunan laporan keuangan disebabkan karena tidak adanya peraturan yang mewajibkan penyusunan laporan keuangan bagi UMKM. Standar akuntansi keuangan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan harus diterapkan secara konsisten.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tahun 2009 telah mensahkan Standar Akuntansi untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP tersebut berlaku efektif per 1 Januari 2011, namun penerapan sebelum tanggal efektif diperbolehkan. Penggunaan SAK ETAP ditujukan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yakni entitas yang: (1) Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, (2) Entitas yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. SAK ETAP merupakan salah satu standar akuntansi yang penggunaannya ditujukan untuk entitas usaha yang tidak memiliki akuntabilitas publik, seperti entitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) (IAI, 2014).

Secara umum SAK ETAP ini lebih mudah dipahami dan tidak sekompleks SAK Umum. Rudiantoro, dan Siregar (2011) menyatakan bahwa diharapkan

UMKM mampu melakukan pembukuan akuntansi untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih informatif dengan tujuan tentunya memberikan kemudahan bagi investor maupun kreditor untuk memberikan bantuan pembiayaan bagi para pengusaha UMKM.

Pelaksanaan pembukuan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan merupakan hal yang masih sulit bagi UMKM. Keterbatasan pengetahuan pembukuan akuntansi, rumitnya proses akuntansi, dan anggapan bahwa laporan keuangan bukanlah hal yang penting bagi UMKM (Jati et.al., 2009). Berbagai macam keterbatasan lain dihadapi oleh UMKM mulai dari latar belakang pendidikan yang tidak mengenal mengenai akuntansi atau tata buku, kurang disiplin dan rajinnya dalam pelaksanaan pembukuan akuntansi, terbatasnya panduan proses akuntansi yang mudah dipahami, minimnya pelatihan yang diperoleh baik dari perguruan tinggi maupun instansi pemerintah dan tidak adanya kecukupan dana untuk mempekerjakan akuntan atau membeli *software* akuntansi untuk mempermudah pelaksanaan pembukuan akuntansi.

Desa atau kelurahan Gombongsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi dikenal sebagai kampung kopi karena lahannya yang sangat luas. Kopi yang berasal dari desa Gombongsari adalah kopi robusta. Desa gombongsari juga memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, sehingga wajar banyak para UMKM yang lahir dari desa ini untuk menawarkan berbagai macam produknya.

Meningkatnya permintaan produk-produk UMKM di desa Gombongsari membuat para pelaku UMKM sangat senang, namun disisi lain mereka kesulitan dalam melakukan ekspansi usaha, dikarenakan minimnya modal. Salah satu syarat lembaga keuangan untuk memberikan pembiayaannya adalah menyerahkan laporan keuangan UMKM. Sebagian besar UMKM desa gombongsari belum menguasai pencatatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Pemahaman para pengusaha UMKM terhadap proses akuntansi dan penyusunan laporan keuangan masih sangat terbatas, maka permasalahannya adalah bagaimana persepsi pengelola UMKM terhadap proses akuntansi atau pembukuan, dan apakah Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) telah diterapkan oleh pengelola UMKM dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan.

Berdasarkan permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengungkap persepsi UMKM Desa Gombongsari mengenai proses akuntansi dan laporan keuangan; (2) mendeskripsikan penerapan Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) pada UMKM Desa Gombongsari; (3) mengungkap kendala-kendala yang dihadapi dalam Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) pada UMKM Desa Gombongsari; (4) bahan kajian untuk

menyusun dan mengembangkan panduan proses akuntansi berdasarkan SAK ETAP untuk UMKM yang mudah diimplementasikan

Sak Etap

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) merupakan salah satu Standar Akuntansi yang penggunaannya ditujukan untuk entitas usaha yang tidak memiliki akuntabilitas publik, seperti entitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) (IAI, 2014). Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tahun 2009 telah mensahkan SAK ETAP. SAK ETAP tersebut berlaku efektif per 1 Januari 2011 namun penerapan sebelum tanggal efektif diperbolehkan.

SAK ETAP bertujuan untuk dapat mengakomodir kebutuhan dari entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, dan untuk membantu membuat standar akuntansi yang dapat digunakan oleh UMKM karena sifatnya yang lebih ringkas dan mudah digunakan dibandingkan dengan SAK Umum (Rudiantoro, dan Siregar, 2011). Hal terpenting dari implementasi SAK ETAP adalah pemahaman yang baik atas SAK ETAP tersebut oleh UMKM tersebut.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Sesuai dengan definisi Undang-undang No.9 Tahun 1995 Usaha Kecil merupakan usaha produktif dengan skala kecil. Usaha Kecil memiliki kriteria kekayaan bersih paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kekayaan Usaha Kecil ini tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per tahun dan memiliki untuk memperoleh kredit dari bank maksimal di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai maksimal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dinyatakan dalam pasal 1 bahwa : "Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang - undang ini".

Menurut Pasal 5 ayat 1, kriteria usaha kecil adalah :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)
3. Milik WNI
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha bersama.

5. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Tabel 1. Batasan/kriteria UMKM

Institusi	Skala Usaha	Keterangan Kriteria
Undang-undang No. 9/1995 tentang usaha kecil	Kecil	Aset ≤ Rp 200 juta diluar tanah dan bangunan Omzet tahunan ≤ Rp 1 Milyar Dimiliki oleh orang Indonesia Independen, tidak berafiliasi dengan usaha menengah-besar
	Mikro	Pekerja < 5 orang termasuk tenaga keluarga yang tidak dibayar
Badan Pusat Statistik (BPS)	Kecil	Pekerja 5-19 orang
	Menengah	Pekerja 20-99 orang
Meneg Koperasi dan PKM	Kecil (UU No. 9/1995)	Asset ≤ Rp 200 juta diluar tanah dan bangunan
	Menengah	Omzet tahunan ≤ Rp 1 Milyar Asset Rp. 200 Juta-10 Milyar

Laporan Keuangan UMKM

Kebanyakan dari UMKM hanya mencatat jumlah uang yang diterima dan dikeluarkan, jumlah barang yang dibeli dan dijual, dan jumlah piutang atau utang. Namun pembukuan itu tidak dengan format yang diinginkan oleh pihak perbankan (Jati et al., 2009). Mempekerjakan seseorang secara khusus untuk melakukan pembukuan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan masih menjadi hal yang kurang realistis bagi banyak UMKM sebab akan menambah pengeluaran untuk membayar gaji dari tenaga akuntansi tersebut.

Murniati (2002) meneliti mengenai faktor - faktor yang mempengaruhi penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi pada perusahaan kecil di Jawa Tengah dengan sampel sebanyak 283 pengusaha kecil dan menengah. Ditemukan hasil bahwa karakteristik pemilik/manajer (masa memimpin, pendidikan formal manajer/pemilik, dan pelatihan akuntansi yang diikuti manajer/pemilik) serta karakteristik perusahaan kecil dan menengah (umur perusahaan, sektor industri, dan skala usaha) secara signifikan berpengaruh positif terhadap penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi pada perusahaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan pendekatan pokok penelitian kualitatif. Populasi penelitian ini adalah pengusaha UMKM di Desa Gombongsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Sampel penelitian sejumlah 30 di Desa Gombongsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, kuesioner dan *Forum Grup Discussion* (FGD). Teknik analisis data penelitian menggunakan triangulasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengumpulan data diperoleh informasi terkait dengan deskripsi responden sebagai berikut: (1) bidang usaha UMKM sebesar 40% bergerak dibidang manufaktur, perdagangan sebesar 35%, dan bidang jasa sebesar 25%. Tingkat pendidikan para pelaku UMKM paling besar berpendidikan SMA sebesar 55%, berpendidikan SMP 10%, dan berpendidikan SD 35%. Hal ini membuat tingkat pemahaman dan pengetahuan mengenai pencatatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sangat rendah. Rata-rata umur pendirian UMKM adalah diatas 5 tahun, dengan status pengelolaan sebesar 30% berbadan hukum koperasi, dan 70% dalam bentuk perorangan.

Sebesar 55% responden telah mematuhi konsep entitas dari akuntansi atau memisahkan pencatatan keuangan terkait kegiatan usaha dengan kegiatan pribadi. 45% responden masih belum mematuhi konsep entitas dari akuntansi. Pencatatan keuangan yang telah dibuat berupa pencatatan pembelian barang/bahan baku baik secara kredit maupun tunai, dan pencatatan penjualan baik kredit maupun tunai. Mencatat beban-beban operasi. Namun para pelaku UMKM di Desa Gombongsari meskipun sebagian besar telah mengerti melakukan pencatatan namun masih beberapa yang masih belum tepat, seperti salah menjurnal, tidak bisa menghitung harga pokok penjualan, dan tidak bisa menyusun laporan keuangan.

Responden mengakui pentingnya proses akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dalam mendukung keberlanjutan perusahaan, karena pemilik usaha tidak mengetahui secara pasti keuntungan yang diperoleh setiap periode dari usaha yang dijalankannya sehingga perencanaan usaha secara pasti tidak dapat dibuat, hal ini sesuai dengan penelitian Rachmawati (2008).

Meskipun pengusaha UMKM menyadari arti penting penyusunan laporan keuangan, tetapi secara umum belum dilaksanakan secara konsisten, dengan berbagai alasan. Persepsi pengusaha UMKM di Desa gombongsari dan sekitarnya mengenai pentingnya keberadaan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengusaha UMKM merasa tidak membutuhkan informasi akuntansi dan menyatakan bahwa sulit untuk melakukan pencatatan akuntansi dengan

segala keterbatasan yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan beberapa penelitian terdahulu (Idrus, 2000; Pinasti, 2001; 2007).

- b. Kebutuhan akan penyelenggaraan catatan akuntansi dianggap hanya membuang waktu dan biaya. Pengusaha UMKM merasa sulit dan repot menyelenggarakan catatan akuntansi dan menganggap bahwa yang terpenting adalah cara menghasilkan laba sebanyak mungkin dari usaha yang dijalankan tanpa dibebani dengan masalah pembukuan atau akuntansi, hal ini sesuai dengan Idrus (2000) dan Pinasti (2001). Hasil penelitian ini mengisyaratkan bahwa para pelaku UMKM menganggap bahwa manfaat atas informasi akuntansi yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan biaya yang harus dikorbankan ketika menyelenggarakan praktik akuntansi secara tepat.

Secara umum responden UMKM di Desa Gembongsari khususnya belum menyelenggarakan proses akuntansi sesuai standar baku dan menggunakan informasi akuntansi secara maksimal dalam pengelolaan usahanya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya (Rochmat, 2003; Fansuri, 2006; Firdaus, 2010; Hubeis, 2012). Rendahnya penyelenggaraan dan penggunaan informasi akuntansi dalam pengelolaan UMKM disebabkan oleh persepsi terhadap pentingnya keberadaan informasi akuntansi bagi UMKM, pengetahuan akuntansi pemilik atau karyawan UMKM, pertimbangan biaya-manfaat bagi UMKM dan ukuran UMKM (Furqan dan Karim, 2012).

Dari hasil wawancara, kuesioner dan FGD, diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat permasalahan yang sering dihadapi oleh pengusaha UMKM Desa Gembongsari terkait beberapa bidang yaitu bidang: (1) SDM, berkaitan dengan tingkat pendidikan yang rendah, motivasi rendah, penguasaan teknologi yang rendah ; (2) tidak bisa menghitung harga pokok produksi, dan harga pokok penjualan ; (3) Pemasaran, meliputi keterbatasan pasar, distribusi maupun luas pasar yang dituju; (4) Keuangan, berkaitan dengan keterbatasan modal, sulit mencari tambahan modal dan juga keterbatasan dalam administrasi pembukuan atau keuangan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Nursetto (2004) Terkait dengan permasalahan keuangan dan pembukuan, para pengusaha UMKM pada umumnya mereka tidak menguasai dan tidak mempraktekkan sistem keuangan yang memadai. Pada umumnya usaha kecil tidak atau belum memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola catatan akuntansi secara ketat dan berdisiplin dengan pembukuan yang teratur, baik dalam bentuk harian, mingguan, bulanan, dan seterusnya, sehingga banyak diantara mereka yang belum memahami pentingnya pencatatan dan pembukuan bagi kelangsungan usaha.

Hasil penelitian ini sesuai hasil studi Meutia (2010) yang menyimpulkan bahwa kompetensi wirausaha sangat mempengaruhi tingkah dan perilaku wirausaha dalam bertindak, yang mana keseluruhan hasil penelitian tersebut

menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kompetensi dan pengetahuan akuntansi pelaku atau staf UMKM terhadap pemanfaatan informasi akuntansi. Untuk itu, dapat dinyatakan bahwa tidak diterapkannya praktik akuntansi secara optimal pada sebagian besar UMKM selama ini dikarenakan pengetahuan akuntansi baik pemilik maupun karyawan UMKM saat ini masih belum memadai (Furqan dan Karim, 2012).

Diperoleh data bahwa perbedaan penerapan akuntansi dilihat dari kategori omzet perusahaan. Hasil ini sesuai dengan penelitian terdahulu Wahyudi (2009) yang menyatakan bahwa omzet perusahaan berpengaruh terhadap penerapan akuntansi. Penerapan akuntansi pada UKM dipengaruhi oleh omzet perusahaan karena semakin tinggi omzet perusahaan berarti semakin kompleks pengelolaan keuangan yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan bantuan suatu sistem yang dapat memudahkan pengelolaan keuangan perusahaan, maka dari itu perusahaan menerapkan akuntansi. Adapun, perusahaan yang omzetnya masih kecil banyak yang belum menerapkan akuntansi karena dirasa masih belum perlu melakukan pengelolaan keuangan dengan rinci, cukup perhitungan manual saja. Selain itu, dengan omzet perusahaan yang masih kecil perusahaan merasa harus menanggung beban yang lebih besar daripada pendapatannya apabila menerapkan akuntansi. Karena UKM dengan omzet kecil menganggap akuntansi terlalu rumit dan membutuhkan banyak waktu.

Hasil ini mendukung Rudiantoro dan Siregar (2011) menunjukkan bahwa ukuran usaha berpengaruh positif terhadap persepsi pengusaha UMKM atas pentingnya pembukuan dan pelaporan keuangan bagi usahanya, sehingga di saat semakin tumbuh dan besarnya usaha UMKM maka pengusaha mulai memandang penting kebutuhan laporan keuangan tersebut. Semakin besar usaha maka pemiliknya mulai memikirkan pentingnya suatu pembukuan dan pelaporan keuangan untuk membantu dalam pengelolaan asset dan penilaian kinerja keuangannya. Untuk itu, dapat dinyatakan bahwa tidak optimalnya penerapan praktik akuntansi pada sebagian besar UMKM selama ini dikarenakan jumlah UMKM di Indonesia masih didominasi oleh Usaha Mikro dan Kecil, dimana jenis kelompok usaha tersebut lebih banyak dikelola secara perseorangan.

KESIMPULAN

Persepsi pengusaha UMKM di Desa Gembongsari mengenai pentingnya keberadaan laporan keuangan, antara lain: pengusaha UMKM merasa tidak membutuhkan informasi akuntansi dan menyatakan bahwa sulit untuk melakukan pencatatan akuntansi dengan segala keterbatasan yang dimiliki; kebutuhan akan penyelenggaraan catatan akuntansi dianggap hanya membuang waktu dan biaya.

Praktik akuntansi pada UMKM mengacu pada SAK ETAP belum terlaksana disebabkan, keterbatasan pengetahuan akuntansi para pengusaha UMKM sehingga tidak mempraktekkan proses akuntansi yang memadai.

Tidak optimalnya penyelenggaraan praktik akuntansi dan pemanfaatan informasi akuntansi pada UMKM selama ini bukanlah semata-mata merupakan kesalahan ataupun kekurangan para pelaku UMKM, tetapi juga dikarenakan belum optimalnya peran serta pemerintah dan Perguruan Tinggi dalam mendorong dan memfasilitasi praktik akuntansi di UMKM.

Secara khusus penerapan akuntansi untuk UMKM di Desa Gembongsari masih memiliki permasalahan yang sama dengan beberapa daerah di Indonesia sehingga solusi dan pendekatan untuk meningkatkan akuntabilitas UMKM harus disusun panduan proses akuntansi berdasarkan ETAP yang *friendly user* dan sistematis oleh pengelola UMKM.

KETERBATASAN

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah keterlibatan organisasi/asosiasi UMKM dan Kementrian Koperasi dan UKM (pembuat kebijakan) belum dieksplorasi dalam penelitian ini sehingga penelitian selanjutnya diharapkan lebih lengkap dengan melibatkan stakeholder dari UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar Arif., dan Wibowo. 2005. *Akuntansi untuk Bisnis Usaha Kecil dan Menengah*. PT Grasindo : Jakarta.
- Baas, Timo dan Schrooten, Mechthild. 2006. Relationship Banking and SMEs: A Theoretical Analysis. *Small Business Economic* Vol 27. No.2. Pp. 26-51.
- Basri, Yuswar Zainul dan Nugroho, Mahendro. 2009. *Ekonomi Kerakyatan: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti Bank Mandiri.
- Czirák, Tišma, dan Pisarović. 2005. Determinant of Low Approval Rate in Croatia. *Small Business Economic*, Vol 25. No. 1. Pp. 41-57
- Husein Umar. 2001. *Riset Akuntansi*. PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia .2014. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)*. Penerbit Salemba Empat: Jakarta.
- Jati, Hironnymus, Bala, Beatus, dan Otnil Nisoni. 2009. Menumbuhkan Kebiasaan Usaha Kecil Menyusun Laporan Keuangan. *Jurnal Bisnis dan Usahawan*. Vol. 2. No. 8, Pp. 210 - 218
- Junita, Fanny. 2009. Persepsi Pengusaha Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Terhadap Kebutuhan Audit Atas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Keuangan Indonesia*. Vol. 16. No.1. Pp. 18-35.

- Meutia. 2010. Meningkatkan Daya Saing Usaha Kecil Menengah Melalui Kompetensi Kewirausahaan dan Modal Sosial, (Sebuah Kajian Teoritis). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Tirtayasa Ekonomi*. Vol. 5. 2. Pp. 167- 174.
- Misra, Fauzan. 2008. Investigasi Dan Analisis Empiris Praktik Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi Audit Indonesia*. Vol. 17. No.1 Pp. 17-32.
- Murniati. 2002. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyiapan dan Penggunaan Informasi Akuntansi pada Pengusaha Kecil dan Menengah di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 3. No.2. Pp. 41-57
- Pinasti, M. 2001. Penggunaan Informasi Akuntansi dalam Pengelolaan Usaha Para Pedagang Kecil di Pasar Tradisional Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*. Vol 3. No. 1. Pp. 10-17.
- Pinasti. 2007. Pengaruh Penyelenggaraan dan Penggunaan Informasi Akuntansi Terhadap Persepsi Pengusaha Kecil atas Informasi Akuntansi: Suatu Riset Eksperimen. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol. 10. No.3. Pp. 321-331.
- Presiden Republik Indonesia. 2008. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.
- Republik Indonesia. 1995. Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Jakarta.
- Rudiantoro, Rizki dan Siregar, Sylvia Veronica. 2011. Kualitas Laporan Keuangan UMKM Serta Prospek Implementasi SAK ETAP. *Simposium Nasional Akuntansi XI*, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Satyo. 2005. UKM dan Kebutuhan Standar, *Media Akuntansi*, Vo. 7 No. 4. Pp. 1-22.
- Suhairi dan Wahdini. 2006. Persepsi Akuntan Terhadap *Overload* Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Bagi Usaha Kecil Dan Menengah. *Simposium Nasional Akuntansi IX*, Padang.
- Suhairi. 2004. *Personality, Accounting Knowledge, Accounting Information Usage and Performance: A Research on Entrepreneurship of Indonesia Medium Industries*, Disertasi, USM, Malaysia.
- Sujoko Efferin., dan Bonnie Soeherman. 2005. Analisis Empiris Tentang Peran Akuntansi Manajemen Dalam Perencanaan dan Pengendalian UKM. *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi*. Vol. 4. No. 2. Pp. 71-91.
- Undang-Undang No. 9 tahun 1995 Tentang Usaha Kecil*, Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, 1995/1996.
- Warsono, Sony dan Murti, Endra. 2010. Akuntansi UMKM Ternyata Mudah Dipahami dan Dipraktikkan. Yogyakarta : BPFE.
- www.depkop.go.id